

PENDAMPINGAN KELOMPOK TANI HUTAN: Pendekatan Pendampingan dan Peran Tenaga Pendamping di Kampung-kampung yang Didukung oleh FORCLIME

ARTIKEL LAINNYA

UNIVERSITAS PAPUA
DAN FORCLIME
BERKOORDINASI
Siapkan *Side Event* Y20
dan W20 di Manokwari,
Papua Barat

UNIVERSITAS
OTTOW GEISSLER
PAPUA SUSUN
RENCANA
Pengelolaan Hutan
Pendidikan

BALAI BESAR TAMAN
NASIONAL LORE LINDU
EVALUASI KESEPAKATAN
KONSERVASI Masyarakat di
Lore Piore dan Lore Tengah,
Sulawesi Tengah

Editorial

Keterbatasan sumber daya tenaga pendamping di lapangan menjadi salah satu faktor belum maksimalnya pendampingan di tingkat kampung. Oleh karena itu diperlukan penguatan potensi dan pengembangan kapasitas pendamping untuk memiliki kemampuan sebagai pendamping yang terjun langsung di masyarakat. FORCLIME telah mengadakan pelatihan pembekalan tenaga pendamping yang bertugas di kampung-kampung yang akan didukung oleh FORCLIME. Peran handal dari seorang pendamping Kelompok Tani Hutan (KTH) sangat diperlukan guna menjawab tantangan-tantangan di lapangan dalam pemberdayaan masyarakat.

Sembilan tenaga pendamping KTH di lapangan telah direkrut untuk sembilan kampung yang akan didukung oleh FORCLIME dalam rangka pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Seluruh tenaga pendamping KTH tersebut direkomendasikan dan dipilih oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, dan Kepala Balai Taman Nasional Wasur sesuai dengan wilayah kampung yang didukung.



Selain pendamping di kampung sasaran pendampingan, proses pendampingan sendiri membutuhkan metode dan pendekatan yang harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat sebagai kelompok sasaran pendampingan. Sosialisasi pada masyarakat dilakukan pada tahap awal untuk memberikan informasi pada masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat. Persetujuan dari masyarakat terhadap informasi yang telah diberikan menjadi kunci penting untuk tahap pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dilakukan pada Kelompok Tani Hutan (KTH). Melalui pendampingan secara intensif diharapkan KTH mampu memiliki kompetensi untuk peningkatan kelas KTH dalam mengelola kelembagaan, mengelola kawasan hutan, dan mengelola usaha KTH. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pendamping yang dapat berperan sebagai Analis, Pendukung (*Supporting*), Fasilitator (*Enabling*), dan juga Motivator (*Empowering*). Prinsip-prinsip yang harus ditegaskan dalam proses pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat meliputi *awareness, interest, desire* dan *action*.

Mohammad Sidiq,
Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan
Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Pendampingan Kelompok Tani Hutan: Pendekatan Pendampingan dan Peran Tenaga Pendamping di Kampung-kampung yang Didukung oleh FORCLIME

Mohammad Sidiq,

Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Tanah Papua, baik itu di Provinsi Papua maupun Papua Barat, adalah pulau terbesar di Indonesia yang memiliki sumber daya alam Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan sangat penting bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat Papua, khususnya masyarakat tani hutan. Masyarakat petani hutan dapat merasakan manfaat langsung secara ekonomi dari HHBK, dan menikmati manfaat tidak langsung dari Jasa Lingkungan seperti manfaat perlindungan dan pengaturan pengelolaan sumber daya air, perlindungan terhadap dampak perubahan iklim, dan potensi ekowisata. Namun, dari hasil identifikasi awal (*baseline data*) oleh tim FORCLIME Papua dan Papua Barat di sembilan kampung yang didukung oleh FORCLIME menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan, akses dan kepastian tentang pasar masih menjadi penyebab utama lambatnya pengembangan usaha pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan oleh masyarakat di kampung-kampung yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Situasi lainnya pada Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) di Papua dan Papua Barat, yakni mereka yang telah memegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial (PS), menunjukkan tantangan besar, terutama dalam hal pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam persetujuan PS, pengetahuan KPS terhadap kegiatan pasca persetujuan PS, peran Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan PS dalam pengembangan kegiatan pasca persetujuan PS, jumlah pendamping dan pengetahuan pendamping dalam pengembangan usaha PS, pembentukan dan penguatan lembaga Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

(KUPS), fasilitasi pengembangan usaha PS, penyediaan akses informasi, akses modal dan akses pasar, serta peran Pemda dan kementerian/lembaga diluar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), termasuk peran dari mitra-mitra pembangunan dalam pengembangan usaha PS.

Mencermati fenomena tersebut menimbulkan keyakinan bahwa masyarakat, terutama Kelompok Tani Hutan (KTH), sangat membutuhkan dukungan program pendampingan baik itu dari pemerintah daerah (KPH/CDK, OPD terkait), kementerian/lembaga diluar KLHK maupun mitra pembangunan. Program pendampingan itu memerlukan peran pendamping yang dapat mengelola proses pemberdayaan bersama anggota KTH atau masyarakat sehingga upaya pemberdayaan tersebut memunculkan perhatian atau kesadaran (*awareness*), menjadi ketertarikan (*interest*), mengubahnya menjadi minat (*desire*), sampai akhirnya dapat mengambil tindakan (*action*) secara mandiri.

Pembekalan Pendamping KTH

Dari sembilan kampung yang didukung FORCLIME, setidaknya ada satu KTH pada setiap kampung memperoleh pendampingan intensif. Diharapkan KTH yang mendapatkan pendampingan dapat memberikan dampak positif, dimana keberhasilan dari satu KTH dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran, ketertarikan, minat, dan tindakan positif dari masyarakat adat di tingkat kampung secara keseluruhan.

Pada tahap awal, sembilan orang tenaga pendamping diberikan pembekalan tentang materi pendampingan yang meliputi kompetensi peningkatan kelas KTH dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan hutan, dan kelola usaha KTH; metode-metode yang mendorong partisipasi masyarakat adat melalui metode pengkajian keadaan kampung, serta pemetaan wilayah dan aktor penting secara partisipatif/*Participatory Rural Appraisal* (PRA). Secara keseluruhan, metode-metode yang dipersiapkan adalah metode yang menekankan pengetahuan lokal dan memungkinkan masyarakat setempat untuk melakukan penilaian, analisis dan perencanaan mereka sendiri.

FORCLIME menyelenggarakan pelatihan pembekalan bagi tenaga-tenaga pendamping untuk pengembangan potensi dan kapasitasnya. Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan selama tiga hari pada bulan April 2022, yaitu pada tanggal 25–27 April. Pada saat pelatihan, dilakukan penilaian secara mandiri (*self assesment*) oleh sembilan peserta tenaga pendamping KTH terhadap penyelenggaraan pelatihan. Berikut ini adalah kesimpulan hasil dari penyelenggaraan pelatihan pembekalan bagi sembilan orang tenaga pendamping KTH.

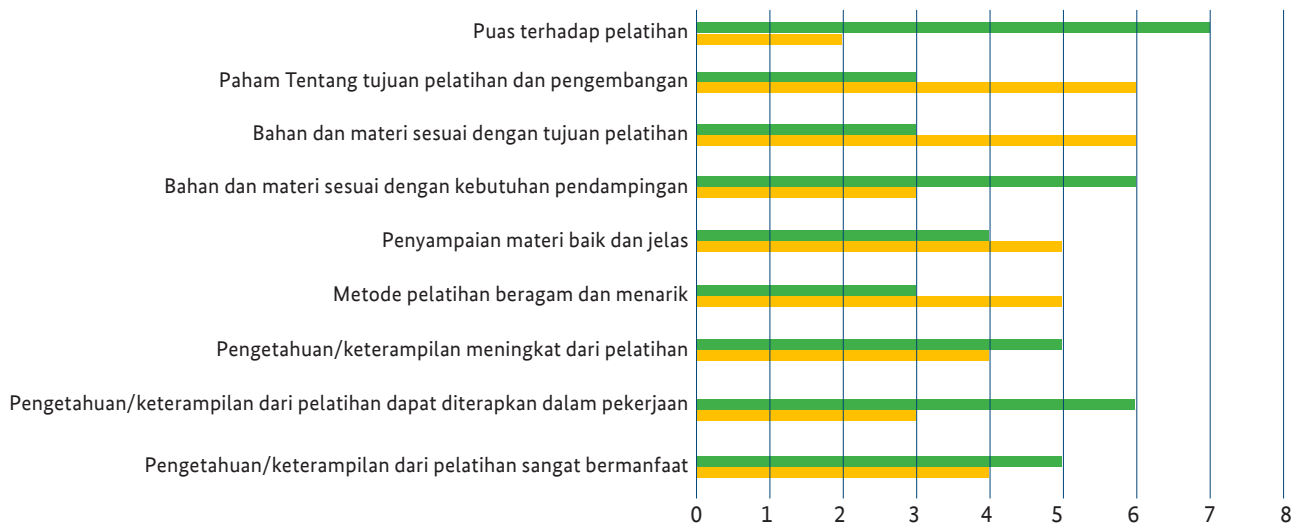
2



Pendalaman Metode Pengkajian Keadaan Kampung.

Kesimpulan Hasil Pelatihan bagi Tenaga Pendamping KTH (9 Orang)

■ Sangat setuju ■ Setuju ■ Netral ■ Tidak setuju ■ Sangat tidak setuju



Materi paling penting yang dipelajari menurut peserta pelatihan:

1. Skema Kehutanan Sosial
2. PADIATAPA/FPIC
3. Kelola Kelembagaan (Pembentukan KTH)
4. Kelola Kawasan (bagian Kawasan hutan yang dikelola KTH)
5. Kelola Usaha (HHBK dan jasa Lingkungan)
6. Pemecahan Masalah
7. Pendampingan (bentuk, teknik, proses dan materi pendampingan)
8. Pengenalan GIZ dan program FORCLIME (tujuan, proyek, kegiatan utama, mekanisme kerja)
9. Pemetaan wilayah
10. Pembangunan KPH

Isu-isu di lapangan yang terkait dengan materi pelatihan

1. Pendampingan Kelompok Tani/Masyarakat (pencanaan, pembentukan KTH, Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan, Kelola Usaha)
2. Penyuluhan, peran dan tanggung jawab pendamping
3. Pemecahan masalah
4. Tujuan program FORCLIME dan tata pelaksanaan kegiatan di lapangan
5. Penyelesaian konflik
6. Pemetaan batas wilayah

3

Pendampingan KTH

Setelah memperoleh pelatihan, selanjutnya para pendamping KTH mengerjakan tugasnya yakni mendampingi KTH di kampung yang telah ditetapkan. Di setiap kampung, proses pendampingan KTH dimulai dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi melalui kegiatan sosialisasi, musyawarah dan diskusi, atau persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (*Free, Prior Informed Consent*-FPIC). Pada tahap ini, para pendamping dan tim FORCLIME menjelaskan rencana dan ruang lingkup kegiatan proyek, untuk mendapatkan penerimaan dari pemilik ulayat, kepala kampung, perwakilan warga kampung, dan KTH atas program kegiatan FORCLIME. Pemahaman dari seluruh aktor di tingkat kampung atas program kegiatan FORCLIME menjadi salah satu indikator keberhasilan sosialisasi program FORCLIME. Hal tersebut menjadi dasar yang kuat bagi KTH dan masyarakat berpartisipasi secara mandiri. Sampai pada situasi dimana KTH dan masyarakat di tingkat kampung memahami bahwa program kegiatan FORCLIME adalah program kerja sama teknis yang mendukung peningkatan kapasitas KTH dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkatan proses, seluruh kegiatan atau langkah-langkah secara bertahap yang dilakukan dalam pendampingan KTH terdiri atas *capacity building* untuk membuat KTH (*agen pembaharu, local champion*) meningkat kapasitasnya dengan memampukan SDM KTH, dan meningkatkan kinerja kelembagaan KTH. Secara substansional KTH didampingi untuk memupuk kemampuan manajerial mereka

terhadap sistem kelola kelembagaan, kawasan hutan dan kelola usahanya. Lebih lanjut, pada setiap proses pendampingan juga dilakukan pengorganisasian wawasan, pengetahuan dan praktik-praktik terbaik sebagai proses pembelajaran dari KTH di setiap kampung.



Pelatihan Pembekalan Pendamping Kelompok Tani Hutan. Sorong, 25-27 April 2022



Pendekatan untuk Kelompok Perhutanan Sosial (KPS)

Seluruh KTH yang direkomendasikan dan terpilih untuk didukung oleh FORCLIME adalah KTH non-KPS, mereka belum memiliki persetujuan menteri untuk skema Perhutanan Sosial. KTH didampingi untuk meningkatkan kualitas SDM KTH dan membantu KTH meningkatkan kinerjanya sehingga peningkatan kelas KTH-nya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika diukur dengan skor penilaian kelas KTH, status kelasnya sesuai dengan dinamika KTH-nya. Penguatan peran dan kinerja KTH akan didorong seluas-luasnya dalam hal mengelola kelembagaan, mengelola kawasan, dan mengelola usaha melalui bimbingan teknis, pelatihan atau studi banding, sehingga dapat mendukung sistem pengelolaan hutan lestari dan konservasi keanekaragaman hayati secara menyeluruh di setiap kampung.

Sementara itu, dukungan FORCLIME terhadap KPS dilakukan dengan melibatkan perwakilan KPS dalam kegiatan KTH di kampung-kampung dukungan FORCLIME, terutama mereka yang lokasi kampungnya berdekatan dengan kampung-kampung tersebut, dengan pendekatan belajar bersama, saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pendekatan ini terutama pada kegiatan pelatihan, yang disesuaikan antara relevansi pelatihan dengan kebutuhan KPS. Manfaat pelatihan bagi KPS mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat mendukung kegiatan pasca persetujuan Perhutanan Sosial untuk pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).





Peran Tenaga Pendampingan

Dalam konteks KTH, kampung-kampung yang didukung oleh FORCLIME belum memiliki skema Perhutanan Sosial (non-KPS), maka tenaga-tenaga pendamping pada kampung-kampung dukungan FORCLIME dikategorikan sebagai Pendamping KTH Binaan, tidak secara spesifik berperan sebagai Pendamping Perhutanan Sosial (PS). Berkaitan dengan profil pendampingnya, hasil dari proses rekrutmen tenaga pendamping menunjukkan

bahwa usia para pendamping di kampung-kampung dukungan FORCLIME antara 27–52 tahun dan termasuk dalam kategori usia produktif. Pendidikan formal yang ditempuh para tenaga pendamping rata-rata tamat sekolah Diploma III dan Sarjana (pertanian dan kehutanan). Sedangkan pendidikan non formal berupa pelatihan, sebagai narasumber kegiatan penyuluhan, kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, dan Pendamping program gerakan rehabilitasi hutan.

Anggota KTH sasaran pendampingan adalah masyarakat adat di perkampungan. Tantangan bagi para pendamping sungguh berat, menghadapi pernyataan sikap yang dianut oleh masyarakat saat ini seperti “program harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekedar janji”. Situasi tersebut mengarahkan bahwa kapabilitas tenaga pendamping dalam realitasnya dituntut mampu membantu permasalahan di tingkat KTH dan kampung, bukan hanya menyangkut permasalahan organisasi kelompok saja namun juga permasalahan perekonomian masyarakat di kampung.

Dari berbagai hasil penelitian, menyimpulkan bahwa tenaga pendamping KTH dalam memberdayakan kelompok tani memiliki beberapa peranan yakni sebagai Analis, Pendukung (*Supporting*), Fasilitator (*Enabling*), dan Motivator (*Empowering*). Secara umum, peran para pendamping KTH dalam melaksanakan tugas pendampingan adalah menyampaikan informasi dan memberikan bimbingan teknis kepada anggota KTH dengan pendekatan pembinaan (*coaching*) yang berkaitan dengan peningkatan kelas KTH dalam aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Oleh karena itu, ada hal yang diharapkan dari proses pendampingan, yakni para pendamping berperan secara signifikan untuk meningkatkan kelas dan fungsi KTH, sehingga keberhasilan dari satu KTH dapat dikembangkan untuk kepentingan masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran, ketertarikan, minat, dan tindakan positif dari masyarakat adat di tingkat kampung secara keseluruhan.

Prinsip dalam pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat	Peran pendamping yang dominan	Kondisi yang diharapkan muncul pada tingkat KTH dan Kampung	Upaya/langkah yang dilakukan oleh pendamping
<p>Perhatian/kesadaran (Attention/awareness)</p> 	Sebagai alat analisis (<i>analyst</i>) dan pendukung (<i>supporting</i>)	Berdasarkan data potensi SDA di dalam wilayah kampung, KTH dan masyarakat di kampung menyadari bahwa ada peluang untuk mulai membangun rencana kelola kelembagaan, kawasan dan usaha dalam rangka menciptakan usaha-usaha produktif.	<ul style="list-style-type: none"> Membantu mendata seluruh potensi SDA dan menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh anggota KTH, dan memberikan contoh nyata penyelesaian masalah dalam menciptakan usaha-usaha produktif yang bisa meningkatkan pendapatan. Membina KTH dan sosialisasi yang intensif dalam bentuk menarik memberikan informasi yang benar dan akurat untuk anggota KTH serta masyarakat kampung agar terciptanya kesamaan persepsi pentingnya SDA untuk usaha-usaha produktif yang bisa meningkatkan pendapatan.
<p>Ketertarikan (interest)</p> 	Sebagai pendukung (<i>supporting</i>) dan fasilitator (<i>enabling</i>)	Ada nilai manfaat atau nilai ekonomis yang diperoleh dari kegiatan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Membina KTH dengan memberikan contoh nyata keberhasilan yang terkait dengan manfaat atau nilai ekonomi baik dilihat sendiri atau diketahui dari pihak-pihak yang dipercaya. Membangun semangat kerja sama antar anggota KTH dan keterikatan yang kuat antar anggota KTH; serta membina KTH untuk memiliki usaha-usaha produktif atau meningkatkan produksi yang bisa meningkatkan pendapatan.
<p>Minat (desire)</p> 	Sebagai fasilitator (<i>enabling</i>) dan motivator (<i>empowering</i>)	Ada peluang besar untuk mulai menciptakan inovasi yang kreatif membuat usaha-usaha produktif yang bisa meningkatkan pendapatan, serta aksesibilitas terhadap penyediaan kebutuhan produksi mudah diperoleh.	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi layanan kebutuhan pemanfaatan HHBK dan/atau Jasa Lingkungan kepada anggota KTH dan masyarakat sebaik-baiknya, jangka panjang ada jalur ekonomi yang menarik komoditas HHBK dan Jasa Lingkungan menjadi alternatif penghasilan. Untuk masyarakat yang bukan sasaran bisa saja difasilitasi untuk menciptakan inovasi yang kreatif di kampung mereka. Menggerakkan, mendorong dan meningkatkan semangat anggota KTH untuk terlibat aktif terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan-kegiatan KTH yang lain, sehingga dapat mengantarkan kelompok menjadi KTH yang kuat, mandiri dan dinamis.
<p>Tindakan (action)</p> 	Sebagai fasilitator (<i>enabling</i>) dan multivator (<i>empowering</i>)	Dengan kesadarannya seluruh anggota KTH, dan masyarakat fokus pada pengembangan usaha; penguatan akses pasar, pembiayaan dan jaringan.	<ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi upaya promosi dan pemasaran untuk meningkatkan jangkauan pasar, meningkatkan <i>branding</i>, menghemat biaya promosi, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Menggerakkan, mendorong dan meningkatkan semangat anggota KTH dan masyarakat di kampung untuk terlibat aktif membangun <i>branding</i> dari suatu produk unggulan.

Kampung Binaan FORCLIME

Ada sembilan kampung binaan FORCLIME, yaitu Bikar dan Emaus di Kabupaten Tambrauw, Haha dan Wendi di Kabupaten Sorong Selatan, Babrongko, Dosay dan Tablasupa di Kabupaten Jayapura, Wasur dan Yaggandur di Kabupaten Merauke. Setiap desa akan didampingi oleh satu pendamping kelompok tani.



Universitas Papua dan FORCLIME Berkoordinasi Siapkan *Side Event* Y20 dan W20 di Manokwari, Papua Barat

Dalam rangka mendukung Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah side event Y20 dan W20, Universitas Papua bersama dengan FORCLIME mengadakan pertemuan koordinasi pada tanggal 19 April 2022. Pertemuan ini membahas persiapan pelaksanaan talkshow dan pameran terkait side event Y20 dan W20 yang akan dilaksanakan di Arboretum Universitas Papua di Manokwari, Papua Barat. Tema talkshow terkait dengan *Youth* (Y20) adalah *Supporting Papua's green future*, sedangkan untuk talkshow Gender (W20) adalah Perempuan dalam pengelolaan hutan lestari di Tanah Papua.

Akan ada dua sesi dalam Talkshow Y20, sesi pertama mengusung sesi pembelajaran (*lessons-learned sharing*) kepada anak muda di Provinsi Papua Barat - '*Supporting Papua's Green Future*' - merupakan program magang FORCLIME yang telah dilaksanakan tiga batch sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Pembicara yang dihadirkan adalah alumni magang FORCLIME yang saat ini telah bekerja dan beraktivitas pada bidang riset, pembangunan hutan pendidikan, program hutan dan

perubahan iklim di Tanah Papua. Sesi kedua akan menampilkan topik Pemuda Inspiratif di Provinsi Papua Barat. Talkshow Y20 ini akan dilaksanakan tanggal 20 Mei 2022.

Sedangkan Talkshow G20 akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022 dengan topik Birokrasi dan Peran Kaum Perempuan, dan Peran Perempuan dalam Pemanfaatan Hutan di Tingkat Tapak. Selama acara dua hari tersebut, akan dilaksanakan pameran yang melibatkan kelompok pemuda dan perempuan di Papua Barat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Nita Yohana**, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan koordinator Provinsi Papua Barat
2. **Melanesia Brigitte Boserren**, Advisor Junior bidang penghidupan (*livelihood*) pedesaan, pengelolaan dan konservasi hutan
3. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan coordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



Universitas Ottow Geissler Papua Susun Rencana Pengelolaan Hutan Pendidikan

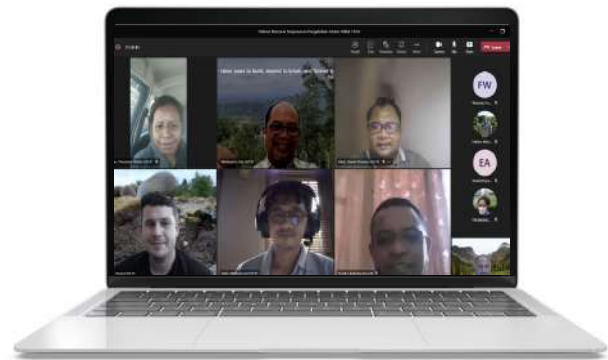
Dalam rangka pengembangan Hutan Pendidikan Universitas Ottow Geissler Papua (UOGP) "Nyei Toro", pada tahun 2021 UOGP, didukung FORCLIME, melaksanakan *Free Prior Informed Consent* (FPIC) atau konsultasi publik dengan masyarakat adat pemilik kawasan dan masyarakat yang ada di dalam dan sekitar calon lokasi Hutan Pendidikan tersebut. Kegiatan FPIC tersebut menghasilkan kesepakatan dan mendapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lain atas rencana pengembangan Hutan Pendidikan. Calon lokasi Hutan Pendidikan UOGP berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang dimiliki oleh masyarakat adat, sehingga UOGP tidak perlu mengajukan proposal perizinan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menindaklanjuti kegiatan FPIC tersebut, UOGP bersama FORCLIME melakukan diskusi membahas penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk Hutan Pendidikan Universitas Ottow Geissler Papua pada tanggal 14 April 2022 di Jayapura, Papua. RPHJP ini perlu disusun sebagai instrumen manajemen agar pengelolaan Hutan Pendidikan bisa berjalan secara efektif dan terarah. Penyusunan RPHJP mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 15/MENLHK/SETJEN/

KUM. 1/5/2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Dosen senior Fakultas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Universitas Ottow Geissler Papua, Frank Leonardo Apituley, S.Hut., M.Si., menyambut baik gagasan penyusunan RPHJP ini. Beliau juga menambahkan bahwa selama ini kegiatan penelitian dan pendidikan sudah dilaksanakan dilaksanakan di lokasi tersebut. Selain itu Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Papua juga menawarkan kerja sama dan dukungan untuk pembangunan Hutan Pendidikan UOGP. Dalam diskusi juga disepakati penyusunan RPHJP ini akan ditindaklanjuti dengan identifikasi data-data yang sudah tersedia sebagai bahan untuk penyusunan deskripsi wilayah Hutan Pendidikan Universitas Ottow Geissler Papua "Nyei Toro".

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Ruben Yogi**, Advisor Junior bidang GIS dan pemetaan hutan
2. **Edy Marbyanto**, Manajer bidang strategis, Pengembangan kapasitas SDM



Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu Evaluasi Kesepakatan Konservasi Masyarakat di Lore Piore dan Lore Tengah, Sulawesi Tengah

Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu melaksanakan kerja sama kemitraan konservasi dengan desa-desa di sekitar kawasan melalui Lembaga Pengelola Konservasi Desa (LPKD) yang dibentuk oleh kepala desa. Adanya kerja sama kemitraan konservasi merupakan wujud pemberian hak kepada masyarakat di sekitar Taman Nasional Lore Lindu untuk mengakses pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), budidaya tradisional dan pemanfaatan jasa lingkungan. Sampai tahun 2021 Balai Taman Nasional Lore Lindu telah menjalin kerja sama kemitraan konservasi dengan 56 desa di sekitar kawasan taman nasional.

Dalam rangka membahas capaian, tantangan dan rencana kegiatan yang akan datang, Balai Taman Nasional Lore Lindu mengadakan lokakarya untuk mengevaluasi kesepakatan konservasi yang ditandatangani pada tahun 2019. Acara yang dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional wilayah III Poso, Bapak Eko Purwanto, S. Hut., dilaksanakan pada tanggal 25 – 25 April 2022 di Lore Tengah, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dalam lokakarya ini dievaluasi kerja sama konservasi di lima desa di Kecamatan Lore Tengah dan empat desa di Kecamatan Lore Piore. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi permasalahan, serta antisipasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan kemitraan konservasi masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKD saat mendapat dukungan pendanaan antara lain sebagai berikut:



- **Penguatan Kelembagaan**, meliputi: pertemuan dan rapat rutin membahas kegiatan yang telah direncanakan, pembelian perlengkapan Sekretariat, mendapat pelatihan pembukuan keuangan lembaga, mendapat pelatihan penulisan dan pendokumentasian.



- **Pengembangan Usaha Ekonomi**, termasuk: melakukan identifikasi pengrajin usaha kerajinan hasil hutan bukan kayu, mendukung pengrajin usaha kerajinan rotan, pandan hutan, dan anyaman gelang Eha, mengembangkan usaha ikan air tawar, melakukan usaha itik petelur. Memungut hasil hutan bukan kayu berupa rotan, bambu dan pandan hutan sebagai bahan baku kerajinan tangan.



- **Kelola Kawasan**: membangun rumah bibit, mengadakan bibit tanaman multi fungsi (durian, alpukat, manggis, kemiri, rambutan, kopi, kakao), mengembangkan pembibitan jenis-jenis tanaman yang termasuk dalam hasil hutan bukan kayu berupa bibit rotan, pandan hutan serta bibit kayu.

Dalam lokakarya juga didiskusikan cara mengatasi hambatan/ tantangan maupun rencana tindak lanjut, antara lain:

1. Mengaktifkan sekretariat serta menyegarkan kembali kepengurusan.
2. Kepala *Resort* diminta untuk membuat laporan berjenjang kepada Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu.
3. Meningkatkan sosialisasi penyadartahuan kepada masyarakat tentang program Kemitraan Konservasi.
4. Membuat jadwal kegiatan pelatihan secara rutin untuk menarik minat generasi muda.
5. Mencari jaringan dan mitra pemasaran produk hasil hutan bukan kayu.
6. Mengidentifikasi produk unggulan untuk dipasarkan secara bersama. Salah satu komoditi yang punya potensi di wilayah Lore adalah kopi. Saat ini GIZ memfasilitasi jaringan pemasaran dengan Catur Coffee.
7. Studi banding ke Jogja untuk belajar budidaya jamur mengingat tingginya potensi jamur di daerah dan untuk menganyam kerajinan (Eha).



Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Fikty Aprilinayati**, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Pengelolaan Cagar Biosfer
2. **Ismet Khaeruddin**, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Salah satu komoditi yang punya potensi di wilayah Lore adalah kopi.



FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de